**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :

Muhammad Faiq La Royabafi

NIM : 31402000345

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM
STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2025

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

Disusun Oleh:

Muhammad Faiq La Roybafi

NIM: 31402000345

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 25 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

Penguji I

Dr. Sri Anik, S.E., M.Si
NIK.210493033

Penguji II

Imam Setijawan, SE, M.Sc., Akt
NIK.211403016

Pembimbing

Hendri Setyawan, SE, MPA

NIK.211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi tanggal 25 April 2025

Program Studi Akuntansi

Provita Wahyuni, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP

NIK.211403012

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

Disusun Oleh:

Muhammad Faiq La Roybafi

NIM: 31402000345

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
siding panitia ujian usulan penelitian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 4 Maret 2025

Pembimbing,

Hendri Setyawan, SE., M.PA

NIK. 211406019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIQ LA ROYBAFI

NIM : 31402000345

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”.

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku .

Semarang, 22 Mei 2025

Muhammad Faiq La Roybafi

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the financial performance of Regional governments, especially in East Java Province. The independent variables in this study include Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund, while the financial performance of local governments is used as the dependent variable. This study uses a quantitative method with a multiple linear regression approach. The data used are secondary data in the form of local government financial reports for 2020–2023. The results of the study show that Regional Original Revenue and General Allocation Fund have a significant effect on financial performance, while Special Allocation Fund and Revenue Allocation Fund do not have a significant effect. These findings are expected to be used as evaluation material for local governments in improving the efficiency and effectiveness of regional financial management.

Keywords : *Financial Performance, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund, Regional Government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas nikmat, dan karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini dengan judul **“Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**. Penyusunan usulan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana(S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Hendri Setyawan, SE, MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam Menyusun Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 22 Mei 2025

Muhammad Faiq La Roybafi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ixiii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TELAAH PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Keagenan	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Kinerja Keungan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1 Tujuan dan fungsi Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.3 Tujuan dan fungsi Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.4 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Belanja Modal	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.2 Sumber-sumber Belanja Modal	Error! Bookmark not defined.

2.1.4.3 Pengukuran Belanja Modal	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Dana Perimbangan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
2.1.6.1 Pengertian Dana Perimbangan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Peneliti Sebelumnya.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan ..	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan..	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	Error! Bookmark not defined.
2.3.4 Pertumbuhan Ekonommi terhadap kinerja keuangan ..	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3.1 Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	Error! Bookmark not defined.
3.3 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.3. 1 Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.1 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda ...	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.3 Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

4.1	Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2	Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.2
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.2
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas.....	Error! Bookmark not defined.4
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.5
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	Error! Bookmark not defined.6
4.2.2.5	Uji Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.7
4.2.2.6	Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
4.2.2.7	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	Error!
	Bookmark not defined.2	
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.4
4.3.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.6
4.3.3	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.6
4.3.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Keterbatasan Penelitian	81
5.3	Saran.....	82
5.3.2	Bagi Pemerintah.....	82
5.3.3	Bagi peneliti selanjutnya	82
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.3
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Definnisi Operasional Variabel dan Pengukuran	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Tabel Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah	Error! Bookmark not defined.7
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.9
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas <i>One-Samplee Kolmogorov-Smirnov</i>	Error! Bookmark not defined.3
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.4
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Gleser ...	Error! Bookmark not defined.6
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.7
Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi	Error! Bookmark not defined.8
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi	70
Tabel 4.9 Hasil Uji F	71
Tabel 4.10 Hasil Uji T	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.1. Grafik Histogram (Sebelum Transformasi Data) ...**Error! Bookmark not defined.**2

Gambar 4.2 Hasil Pengolahan Data Uji Heteroskedastisitas**Error! Bookmark not defined.**5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, ditetapkannya sistem otonomi daerah sehingga sering kali disebut sebagai UU Otonomi Daerah. Berdasarkan UU diatas, dapat ditarik garis besar bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan yang diberikan kepada daerah dengan menganut prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan rakyat dengan direalisasikan secara nyata dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya daerah yang ada guna pembangunan daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada daerah.

Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk secara independen menciptakan peraturan lokal, merencanakan dan menerapkan kebijakan, serta mengatur keuangan wilayahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan juga pembangunan didaerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang ada di setiap daerah (Septariani & Asoka, 2022).

Desentralisasi merupakan salah satu bentuk dilaksanakannya otonomi daerah dengan harapan kemandirian daerah dalam mengaturdan mengurus

sendiri pembangunan daerahnya guna kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada undang-undang yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah terkait dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan nilai uang, serta semua jenis kekayaan yang bisa dimiliki oleh daerah dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mengukur dan melihat kinerja pemerintah dalam diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sangat penting karena keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah diukur dari kinerjanya. Kemampuan mengelola anggaran mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan yang mempengaruhi pula tingkat pembiayaan pemerintah

dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun daerahnya. (Tambuwun,2014).

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah (Halim, 2018). Beberapa rasio yang dapat digunakan adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, ataupun lainnya. Hasil perhitungan analisis rasio yang diterapkan pada APBD dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya keuangan. Pendapatan, belanja, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kondisi makro daerah merupakan faktor penentu utama kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang berpotensi memengaruhinya. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh data yang disajikan di laporan keuangan dan dijelaskan oleh rasio keuangan (Wahyudin dan Hastuti, 2020).

PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan dan pengeluaran pemerintah daerah. PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD penting bagi daerah karena dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan menunjang kesejahteraan masyarakat, Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, penelitian Ni

Putu Gina Sukma Antari (2018) dan Ihsan Wahyudin (2020) menemukan hasil tersebut.

Dana perimbangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Semakin besar dana perimbangan, maka semakin besar pula sumber keuangan daerah yang dapat mendorong kinerja keuangan daerah. Selain membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan.

Menurut Arif et al (2010:188), belanja modal adalah belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah. Menghasilkan aset tetap pemerintah termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara positif maupun negatif. Belanja modal yang tepat sasaran dan tepat guna dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal yang berpengaruh negatif dapat menurunkan kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Dapat dikatakan bahwa ketika suatu periode ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif maka aktivitas

ekonomi meningkat, tetapi ketika ekonomi mengalami pertumbuhan negatif selama suatu periode, aktivitas ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (Gross Domestic Product) juga dapat menjadi indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu menjadi hasil tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dan seharusnya pemerintah daerah dapat membuktikan dengan kinerja yang baik termasuk dalam hal keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Hamzah, (2020), dan Nasution & Panggabean, (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan pada penelitian terdahulu memiliki fokus utama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, Hasil penelitian ini berkontribusi guna memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi pengelolaan dan pelayanan masyarakat dan dimaksudkan agar bermanfaat sebagai elemen yang perlu direfleksikan dan diberikan masukan kepada pemerintah daerah di berbagai wilayah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali untuk menganalisis faktor-faktor yang ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi selama periode

2020-2023 pada provinsi Jawa Tengah dengan judul “**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan Asli DAerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji pengaruh Dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh Belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada penulisan ini penulis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Disamping mencakup

landasan teori, bab ini juga mencakup penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang dilakukan dalam penelitian. Bab ini mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian, serta menjelaskan definisi operasional. Selanjutnya menjelaskan mengenai sumber dan jenis data yang digunakan, menjelaskan prosedur pengumpulan data serta metode penentuan sample. Disamping itu, juga menjelaskan teknik analisis yang akan dilakukan.

BAB VI : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian. Kemudian menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian, Selanjutnya, berisi pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.

BAB V : KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, penelitian yang akan datang dan saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori ekonomi yang membahas hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan perintah, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima perintah dari principal. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling berpendapat bahwa hubungan antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda.

Konflik kepentingan yang berkelanjutan dapat menjadi kerugian bagi organisasi seperti biaya agensi yang muncul akibat dari konflik kepentingan. Menurut (Mahdiana dan Amin, 2020) teori agensi mengasumsikan masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Teori agensi digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian kinerja keuangan dikarenakan membahas hubungan antara prinsipal sebagai masyarakat dan agen sebagai pemerintah. Beberapa variabel dapat menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya seperti: ukuran pemerintah

daerah yang menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, layanan publik, serta pembangunan secara efektif dan efisien tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat.

Pengertian Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Indriani P. Ekasuryana. 2018:8) Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.2.1 Tujuan dan fungsi Keuangan Daerah

Tujuan utama dalam mengatur keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerahnya. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moh Khusaini (2018:2) pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya menetapkan:

1. Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah.
4. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Terdapat pula prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah:

1. Transparansi :

Diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasi.

2. Kejujuran Keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

3. Value of money Dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memerhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.

4. Pengendalian Dalam prinsip ini, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Arsan Latif pada buku yang berjudul pintar pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pratiwi (2018: 35) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

1. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pratiwi, 2018:36). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Pajak Provinsi, antara lain:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 7) Pajak Parker
- 8) Pajak Air Bawah Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Wallow
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2. Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontra prestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan. Jenis pendapatan retribusi Kota/Kabupaten terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Termasuk dalam retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi pada jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/manfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam retribusi jasa usaha diantaranya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, distribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa, retribusi rumah potong ayam, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu. Sementara itu retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan atas pelayan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam distribusi perizinan diantaranya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Tujuan BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang efektif dalam melayani masyarakat. Dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, penerimaan

ini berasal dari penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro.

Pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Lain giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- c. Pendapatan giro
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan aturan pengadaan barang dan atau aturan jasa oleh daerah.

2.1.3.3 Tujuan dan fungsi Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin, adanya penunjang, penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian urusan daerah.

2.1.3.4 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Rasio kemampuan keuangan daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, ASP 2014 X 100%

Berdasarkan rasio tersebut, dapat mengetahui bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kemampuan keuangan daerah.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktivitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No 33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambha masa umur, manfaat, dan kapasitas
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
3. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/ asset lainnya.

2.1.4.2 Sumber-sumber Belanja Modal

Belanja modal meliputi antara lain belanja tanah, gedung & bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal memiliki 5 (lima) Kategori, yaitu:

1. Belanja modal tanah :

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan dengan melakukan biaya tertentu untuk melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian, dalam memanfaatkan tanah. Pengeluaran juga bisa dilakukan untuk keperluan balik nama, pengosongan, sewa tanah, peralatan, pengurangan, pembuatan sertifikat, pematangan tanah, dan berbagai pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan hak pada tanah. Kriteria dari belanja modal tanah ini harus berada dalam kondisi siap pakai agar manfaatnya bisa segera diperoleh.

2. Belanja modal peralatan dan mesin :

Jenis belanja modal ini adalah pengeluaran pada berbagai macam jenis biaya yang digunakan untuk tujuan pengadaan, penggantian, penambahan, dan juga peningkatan kualitas alat atau mesin yang bisa digunakan untuk operasional usaha. Kriteria pada pengeluaran ini adalah berbagai macam inventaris perusahaan yang mampu memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Berbagai peralatan dan mesin ini juga harus dipastikan dalam kondisi yang siap pakai setelah adanya pengeluaran.

3. Belanja modal gedung dan bangunan :

Belanja modal pada gedung dan juga bangunan adalah pengeluaran atas adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses pengadaan,

penggantian, penambahan, atas bangunan ataupun gedung. Belanja modal ini pun mencakup kegiatan pengeluaran untuk pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan juga meningkatkan kapasitas gedung atau bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan :

Belanja modal jenis ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penambahan, pengadaan, penggantian, peningkatan kualitas pembangunan dan perawatan jalan, irigasi, serta jaringan. Pengeluaran ini juga mencakup anggaran untuk perawatan, perencanaan, pengawasan dan juga pengelolaan jalan, irigasi, dan juga jaringan agar benar-benar siap untuk digunakan.

5. Belanja modal aset tetap lainnya.

Selain belanja modal pada alat, mesin, tanah, bangunan, irigasi, dan jalan, ternyata masih ada beberapa belanja modal lagi yang bisa menjadi aset tetap. Contoh dari belanja modal fisik lainnya ini mencakup kontrak kegiatan sewa beli, perbelanjaan barang kesenian, purbakala, buku, dan juga jurnal ilmiah.

2.1.4.3 Pengukuran Belanja Modal

Rasio Efektifitas Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rasio tersebut, dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran itu. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang bersifat rutin.

2.1.5 Dana Perimbangan

2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2008:137).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”. Menurut Djaenuri (2012) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana

Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pembagian Dana Perimbangan Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri

atas :

- a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh

persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut: (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi. (2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Darise

(2008), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi khusus adalah Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah. Daerah yang memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Pengertian Dana Perimbangan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu indikator, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.

5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Secara makro pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. PDRB yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB dalam Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB ini dapat didasarkan pada harga konstan. PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar

Peneliti sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat pada proposal penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan kinerja keuangan, peneliti sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat pada proposal penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Peneliti Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat pada proposal penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang diteliti	Metode & Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Amin Insani et al. (2023)	Independen: PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Statistik deskriptif, regresi linear berganda (SPSS 23)	PAD positif, Dana Perimbangan negatif, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan	Lokasi penelitian di Provinsi Jambi; tidak mencakup kondisi di Jawa Tengah
2	Regil Nurul Fathah (2017)	Independen: Laporan Keuangan	Rasio Efektivitas, Efisiensi,	Rasio Pertumbuhan PAD positif; Kemandirian Keuangan rendah	Tidak mencakup Dana Perimbangan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang diteliti	Metode & Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Pemerintah Daerah Dependen: Kinerja Keuangan	Rasio Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Kemandirian		hanya pada Kabupaten Gunung Kidul
3	Indriani P. Ekasuryana et al. (2018)	Independen: PAD, Dana Perimbangan Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Statistik deskriptif, regresi linear berganda (SPSS 23)	PAD positif signifikan, Dana Perimbangan negatif signifikan	Lokasi terbatas di Kabupaten Bogor; periode sebelum pandemi
4	Ni Putu Gina S. Antari et al. (2018)	Independen: PAD, Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis regresi linear berganda	PAD signifikan positif, Belanja Modal signifikan negatif	Fokus di Provinsi Bali, tidak mencakup Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi
5	Hasna Lathifah dan Haryanto (2019)				

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang diteliti	Metode & Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Pemerintah Daerah			sebelum pandemi
6	Reni Astriani (2020)	Independen: PAD, Belanja Modal Intervening: Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi linear berganda, EViews 9.0	PAD dan Belanja Modal signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi	Lingkup nasional; tidak fokus pada daerah tertentu
7	Tri Yuni Pratiwi (2018)	Independen: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi linear sederhana	PAD positif signifikan, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak signifikan	Fokus di Provinsi Jawa Tengah; tidak mencakup efek simultan semua variabel

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang diteliti	Metode & Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
8	Novita Sari et al. (2020)	Independen: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi linear berganda, SPSS	PAD dan Belanja Modal signifikan; Dana Perimbangan tidak signifikan	Fokus di Sumatera Utara; tidak mencakup Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen
9	Ni Made Diah P. Sari et al. (2019)	Independen: Ukuran Pemerintah, PAD, Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi linear berganda	PAD dan Belanja Modal positif signifikan; Ukuran Pemerintah negatif signifikan	Tidak mencakup Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi; fokus di Kabupaten Badung
10	Yuliasti Leki et al. (2018)	Independen: PAD, Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi linear berganda, SPSS 22	PAD signifikan positif; Belanja Modal tidak signifikan	Fokus di Halmahera Barat; tidak mencakup variabel Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan wilayahnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat dalam batas yang telah ditetapkan oleh peraturan (Dali et al., 2021).

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022, PAD merujuk pada pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah melalui berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian Ningrat & Supadmi, (2019) pendapatan asli daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan Andaresta et al. (2021) bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari pemberian dana perimbangan adalah guna membantu melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah, terpenting dalam meningkatkan jasa dan kemakmuran masyarakat untuk lebih baik (Budianto & Alexander, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Digidowiseiso et al. (2022) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan guna memperoleh aset tetap ataupun aset lainnya yang memberikan suatu kegunaan lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Penelitian yang dilakukan Sari & Mustanda (2019) menyatakan belanja modal memiliki pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Artinya, semakin tinggi alokasi anggaran untuk belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. Peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemda akan berkontribusi pada kenaikan fasilitas serta potensi daerah, kemudian akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan mendorong pencapaian kinerja keuangan pemda yang optimal. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukma et al. (2021) menemukan bahwa pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah terjadi. Ketika alokasi dana anggaran dilaksanakan secara efektif, maka akan meningkatkan aset dengan manfaat jangka panjang. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya belanja modal, menciptakan pendapatan di berbagai sektor dan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Argumentasi ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Lestari & Hapsari, 2020) bahwa ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan.

H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja keuangan

Pertumbuhan ekonomi secara umum mengacu pada peningkatan kapasitas ekonomi suatu daerah terkait menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penggambaran mengenai perkembangan aktivitas ekonomi sebuah negara dapat memperoleh peningkatan income masyarakat di jangka waktu tertentu (Heryanti et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal ini, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan besarnya potensi daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution & Panggabean (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat potensi ekonomi suatu daerah yang besar, dan ini dapat berkontribusi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

H4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) berupa Kinerja Keuangan, Sedangkan variabel independen (variabel bebas) berupa PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi .

Dibawah ini adalah gambaran skema kerangka pikir teoritis dari penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan yang menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif merupakan metode dalam menguji suatu teori tertentu melalui cara penelitian terkait hubungan antar variabel. Pendekatan penelitian kuantitatif memiliki asumsi dasar yang tidak sama dengan penelitian kualitatif Menurut (Sugiyono, 2017:11).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan mengambil data sekunder / data yang diperoleh dari peneliti terdahulu seperti jurnal penelitian, web resmi seperti CALK sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023.

3.1.2 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, data penelitian ini menggunakan data 4 tahun terakhir yakni tahun 2020-2023 karena merupakan tahun terbaru dalam pelaporan keuangan serta menunjukkan kondisi yang relevan dengan kinerja keuangan pemda terkini.

3.1.3 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebagian dari populasi. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Menggunakan sampling jenuh karena populasi penelitian ini sedikit yakni 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sampling jenuh memberikan keunggulan dalam mencakup semua elemen tanpa terkecuali, sehingga meningkatkan generalisasi hasil untuk konteks populasi tersebut. Teknik ini memastikan tidak ada bias yang muncul karena pengecualian anggota populasi tertentu. Karena jumlah subjek yang relatif kecil, pendekatan ini memberikan hasil yang kuat dalam analisis statistik yang akan dilakukan, khususnya untuk menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel. Karakteristik yang diambil dalam sample mencakup aspek geografis dan administratif yang luas yaitu :

- a. Kabupaten: Contohnya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, hingga Brebes
- b. Kota: Termasuk Kota Magelang, Surakarta, Semarang, dan lainnya

Hal ini memastikan cakupan menyeluruh yang mewakili dinamika ekonomi dan administrasi di berbagai wilayah Jawa Tengah.

3.1.3.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, sebagai sumber, dan sebagai cara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni metode studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan data dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data-data yang diperlukan dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online melalui permintaan informasi publik. Data yang dimaksud adalah Catatan Atas Laporan Keuangan dan BPS.

3.1.4 Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya dari orang lain atau dokumen. Data sekunder yaitu informasi yang telah ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, misalnya penelitian terdahulu dan jurnal-

jurnal yang memuat data mengenai judul penelitian dan sumber yang dapat di jadikan sumber oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan dan BPS.

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Uraian terhadap dua variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yang kemudian diuji untuk mendapatkan hasil baik berpengaruh secara positif maupun berpengaruh secara negatif. Variabel Independen juga dikenal sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang memengaruhi variabel lain dimana ketika terdapat dua jenis variabel yang saling berhubungan dengan status hubungan adalah bahwa perubahan variabel yang satu memengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel lain, maka variabel yang memengaruhi ini dikatakan variabel bebas (*independent variable*). Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1)

Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

b. Dana Perimbangan (X2)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 menerangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan/DP} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

c. Belanja Modal (X3)

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dengan baik dan benar (Pratiwi: 2018).

d. Pertumbuhan Ekonomi (X4)

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, biasanya diikuti pula oleh tingginya kesejahteraan masyarakat. Rasio Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan melihat nilai PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya (Marizka, 2013):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi/PE} = \frac{(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan } p - \text{Pendapatan } p-1}{\text{Pendapatan } p-1} \times 100\%$$

2. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain, istilah lain variabel dependen adalah variabel akibat yang terpengaruh. Variabel dependen penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Ramli Faud, 2016).

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Merupakan capaian atau hasil kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan.	<p>Rasio Pertumbuhan =</p> $\frac{\text{Pendapatan } p - \text{Pendapatan } p-1}{\text{Pendapatan } p-1} \times 100$ <p>(Mahmudi (2019))</p>	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar penda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.	<p>PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD yang Sah</p> <p>(Undang-undang nomor 23 tahun 2014)</p>	Nominal
Dana Perimbangan (X ₂)	Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	<p>Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus</p> <p>(Undang-undang nomor 23 tahun 2014)</p>	Nominal

Belanja Modal (X3)	Rasio Efektifitas Belanja Modal	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$ <p>(Mia Jauhariah 2022)</p>	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (X4)	Merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam	$PE = \frac{-(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>(Prawoto (2019))</p>	Rasio

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah dan metode yang sistematis untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil:

3.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan data. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan informasi yang dapat digali dari data secara komprehensif dengan cara mendeskripsikan data melalui berbagai cara. Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif ini meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

3.3.1.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Pada uji normalitas dapat diketahui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika titik-titik data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Jika signifikansi pada nilai Kolmogrov Smirnov $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai K-S $> 0,05$, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.

2. Uji Goodness-of-Fit

metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu dataset sesuai atau cocok dengan distribusi teoretis tertentu. Distribusi teoretis ini bisa berupa distribusi normal, Poisson, eksponensial, atau lainnya, tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Uji Goodness-of-Fit memiliki 2 tujuan yaitu :

1. Memverifikasi Asumsi Distribusi :

Digunakan untuk memastikan bahwa data mengikuti distribusi tertentu yang diasumsikan sebelum melakukan analisis statistik yang bergantung pada distribusi tersebut.

2. Menilai Kesesuaian Model:

Memeriksa apakah suatu model statistik atau distribusi teoretis mampu menjelaskan pola data yang diamati.

Uji Goodness-of Fit memiliki beberapa metode, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara distribusi kumulatif dari data sampel dan distribusi kumulatif yang diharapkan. Jika H_0 (Hipotesis Nol): Data mengikuti distribusi teoretis tertentu. Jika H_1 (Hipotesis Alternatif): Data tidak mengikuti distribusi teoretis tertentu.

Metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu

dataset sesuai atau cocok dengan distribusi teoretis tertentu. Distribusi teoretis ini bisa berupa distribusi normal, Poisson, eksponensial, atau lainnya, tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Uji Goodness-of-Fit memiliki 2 tujuan yaitu :

1. Memverifikasi Asumsi Distribusi :

Digunakan untuk memastikan bahwa data mengikuti distribusi tertentu yang diasumsikan sebelum melakukan analisis statistik yang bergantung pada distribusi tersebut

2. Menilai Kesesuaian Model:

Memeriksa apakah suatu model statistik atau distribusi teoretis mampu menjelaskan pola data yang diamati

Uji Goodness-of Fit memiliki beberapa metode, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara distribusi kumulatif dari data sampel dan distribusi kumulatif yang diharapkan. Jika H_0 (Hipotesis Nol): Data mengikuti distribusi teoretis tertentu. Jika H_1 (Hipotesis Alternatif): Data tidak mengikuti distribusi teoretis tertentu.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot dan uji glejser. Pada uji grafik plot, ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melihat pola pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, maka di indikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Namun, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji glejser, nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila variabel independen secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik merupakan yang terbebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan nilai dari Durbin- Watson (DW), perkiraan nilai DW mulai dari 0-4. Dasar keputusan ada atau tidaknya korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.3.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X1: Pendapatan Asli Daerah

X2: Dana Perimbangan

X3: Belanja Modal

X4: Pertumbuhan Ekonomi

ε : Error / tingkat kesalahan

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi variabel

3.3.1.3 Uji Hipotesis

3.3.1.3.1 Uji Goodness Of Fit

Digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi yang telah dibuat sesuai dengan data yang digunakan. Dua komponen utama dalam evaluasi ini adalah Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2). Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkahnya :

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen atau terikat. Keputusan pengujian hipotesis simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh pada pengolahan data menggunakan SPSS.

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi independen. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 semakin mendekati 1,

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Jika nilai sig $> 0,05$ atau nilai t hitung $< t$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y atau H_a ditolak. Sedangkan jika nilai sig $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota, di mana terdapat 29 kabupaten dan 6 kota.

Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar, sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.365 hektar.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota dan tahun pengamatan selama lima tahun yakni tahun 2020-2023, maka data dalam penelitian ini berjumlah 140 data.

Berikut gambaran umum objek penelitian:

Tabel 4.1**Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah**

NO	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali
10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang
18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang
26.	Kab. Pekalongan

27.	Kab. Pemalang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023. Berikut ini tabel menyajikan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	140	84120000.00	2835150000000.00	448473320034.1287	381901460180.07970
Dana Perimbangan	140	542580000000.00	2343240000000.00	1546473928571.4282	437803877703.17580
Belanja Modal	140	5580000.00	1089360000000.00	277821731454.2499	167803029345.42303
Pertumbuhan Ekonomi	140	-89.64	10.17	8.6758	81.58981
Kinerja Keuangan	140	-260.86	99.31	1.3135	31.83065
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 sampel data yang terdiri 35 kabupaten/kota dikalikan dengan periode penelitian selama 4 tahun. Tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 448.473.320.034,1287 dengan standar deviasi sebesar 381901460180.07970. Nilai terendah (minimum) dari PAD adalah sebesar Rp 84.120.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2023, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari PAD adalah sebesar Rp 2.835.150.000.000,00 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2023. Nilai standar deviasi yang cukup besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (rasio sekitar 85,1%) mengindikasikan bahwa terdapat penyebaran data yang tinggi antar daerah dalam hal PAD, yang menunjukkan adanya ketimpangan, ketidakmerataan atau Variasi tinggi, data tidak merata dalam penerimaan PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Nilai rata-rata (mean) dari Dana Perimbangan sebesar Rp 1.546.473.928.571,4282 dengan standar deviasi sebesar 437803877703.17580. Nilai terendah (minimum) dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 542.580.000.000,00 yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2022, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 2.343.240.000.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2023. Rasio standar deviasi terhadap mean sebesar 28,3% menunjukkan bahwa distribusi nilai Dana Perimbangan relatif merata di seluruh daerah. Hal ini wajar mengingat Dana Perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat dan mengikuti formula distribusi tertentu berdasarkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah

Nilai rata-rata (mean) dari Belanja Modal sebesar Rp 277.821.731.454,2499 dengan standar deviasi sebesar 167803029345.42303. Nilai terendah (minimum) dari Belanja Modal adalah sebesar Rp 5.580.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Belanja Modal adalah sebesar Rp 1.089.360.000.000,00 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2023. Rasio sebesar 60,4% menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal cukup bervariasi antar daerah, yang mencerminkan perbedaan kebijakan belanja serta kapasitas fiskal tiap daerah

Nilai rata-rata (mean) dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8.6758 persen dengan standar deviasi sebesar 81.58981. Nilai terendah (minimum) dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -89.64 persen yang dimiliki oleh Kota Pekalongan pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 10,17 persen yang dimiliki oleh Kab.

Wonogiri pada tahun 2022. Rasio standar deviasi terhadap rata-rata yang sangat tinggi (lebih dari 940%) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sangat ekstrem antar daerah dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan tercatat nilai minimum pertumbuhan ekonomi berada pada angka -89,64%. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup signifikan.

Nilai rata-rata (mean) dari Kinerja Keuangan Pemda sebesar 1.3135 persen dengan standar deviasi sebesar 31.83065. Nilai terendah (minimum) dari Kinerja Keuangan Pemda adalah sebesar -260.86 persen yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Kinerja Keuangan Pemda adalah sebesar 99.31 persen yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023. Dengan rasio standar deviasi terhadap rata-rata mencapai 2.420%, variabel ini menunjukkan tingkat penyebaran data yang sangat tinggi, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang tajam dalam kinerja keuangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dilakukan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. (Ghozali,2018) Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan plot dan one - sample Kolmogorov – Smirnov. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka berdistribusi normal dan jika nilai $< 0,05$ tidak berdistribusi normal. Hasil pengolahan data uji normalitas sebagai berikut:

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Plot

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas *One-Samplee*
*Kolmogorov-Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.2142857
	Std. Deviation	19.51407163
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.065
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Dalam Gambar 4.1 terlihat bahwa ploting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi dinyatakan normal. Untuk memastikan data tersebut normal maka diuji menggunakan *One-Samplee Kolmogorov-Smirnov*, terlihat pada Tabel 4.3 bahwa nilai signifikansi sebesar $0,07 > 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi gejala multikolinieritas, jika nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,000$ (Ghozali,2018). Hasil pengolahan data uji multokolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	.135	7.423
	Belanja Modal	.920	1.087
	Dana Perimbangan	.132	7.565
	Pertumbuhan Ekonomi	.974	1.026

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk keempat variabel dibawah 10,00. Selain itu, nilai Tolerance ketiga variabel independen menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dan residual dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali,2018). Hasil pengolahan data uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Gambar 4.2

Hasil Pengolahan Data Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu dan tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Maka data tersebut tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk memastikan data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas maka di uji menggunakan Uji Gleser sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Gleser

Coefficients^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	138.130	76.531
	Pendapatan Asli Daerah	-2.500	1.490
	Belanja Modal	-.978	2.784
	Dana Perimbangan	-1.189	1.427
	Pertumbuhan Ekonomi	-.014	.012
a. Dependent Variable: Abs_Reg			

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Dalam Tabel 4.5 terlihat bahwa nilai signifikan ke empat variable lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak ada gejala heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif apabila $-d < d < 4 - d$. Berikut hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.476 ^a	.227	.204	28.39839	1.879
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.879. Jika dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n) = 140. Rentang nilai Durbin-Watson yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- $d < dL$ atau $d > (4 - dL)$: terdapat autokorelasi positif atau negatif.
- $dU < d < (4 - dU)$: tidak ada autokorelasi.
- $dL < d < dU$ atau $(4 - dU) < d < (4 - dL)$: tidak dapat disimpulkan.

Dengan mempertimbangkan batas Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5%, nilai DW sebesar 1.879 berada dalam rentang dU hingga $(4 - dU)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan.

4.2.2.5 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil persamaan regresi yang diolah dapat dilihat sebagai Berikut:

Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-586.644	185.267	-3.166	.002
	Pendapatan Asli Daerah	13.282	3.607	3.682	.000
	Belanja Modal	14.403	6.739	2.137	.034
	Dana Perimbangan	-6.397	3.455	-1.851	.066
	Pertumbuhan Ekonomi	.018	.030	.602	.548

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Dari hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -586.644 + 13.282X_1 + 14.403X_2 - 6.397X_3 + 0.018X_4$$

Persamaan tersebut menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Interpretasi dari masing-masing koefisien dalam model ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Konstanta (Intercept) = -586.644**

Konstanta menunjukkan nilai kinerja keuangan pemerintah daerah ketika seluruh variabel independen dianggap tidak ada atau bernilai nol. Artinya, jika PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi

semuanya bernilai nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bernilai -586.644.

2. **Koefisien PAD (X₁) = 13.282**

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 13.282 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi untuk PAD sebesar 0.000 ($p < 0.05$) mengindikasikan bahwa pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD akan meningkatkan kinerja keuangan.

3. **Koefisien Belanja Modal (X₂) = 14.403**

Koefisien ini menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Belanja Modal akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 14.403 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi sebesar 0.034 (< 0.05) menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal juga signifikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin besar Belanja Modal akan meningkatkan kinerja keuangan.

4. **Koefisien Dana Perimbangan (X₃) = -6.397**

Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada dana perimbangan justru menurunkan kinerja keuangan sebesar 6.397 satuan. Namun, karena nilai signifikansi sebesar 0.066 (> 0.05), Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan.

5. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X₄) = 0.018

Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.018 satuan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0.548 (> 0.05) menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin besar Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan kinerja keuangan.

4.2.2.6 Uji Hipotesis

4.2.2.6.1 Uji Goodness Of Fit

Uji Goodness Of Fit digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi yang telah dibuat sesuai dengan data yang digunakan dengan menggunakan dua komponen utama dalam evaluasi yaitu :

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 ^a	.227	.204	28.39839
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan				

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,204. Hal ini berarti bahwa 20,4% variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan sisanya 79,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diajukan atau tidak ada dalam penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31960.144	4	7990.036	9.907	.000 ^b
	Residual	108873.271	135	806.469		
	Total	140833.415	139			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan						

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan, Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.2.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengambilan keputusan uji t yakni membandingkan signifikansi nilai dan nilai t koefisien masing-masing regresi dengan tingkat signifikan telah dipilih yakni dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfabanya 0,05 dengan $df = n - k$. Dimana $k =$ jumlah variabel (variabel bebas+ variabel terikat) dan $n =$ jumlah sampel pembentuk regresi.

Hasil pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji T

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	13,282	-3,682	0,000	Signifikan	H1 diterima
Belanja Modal (X2)	14,403	2,137	0,034	Signifikan	H2 diterima
Dana Perimbangan (X3)	-6,397	-1,851	0,066	Tidak Signifikan	H3 ditolak
Pertumbuhan Ekonomi (X4)	0,018	0,602	0,548	Tidak Signifikan	H4 ditolak

Sumber: Olah data dari SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji t diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel PAD, dihasilkan bahwa t hitung senilai 3,682 > dari t tabel senilai 1,660 dan nilai signifikan yakni sebesar $0,000 < 0,05$, maka H1 dapat diterima yang menyatakan

bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Belanja Modal

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel Belanja Modal, dihasilkan bahwa t hitung senilai $2,137 >$ dari t tabel senilai $1,660$ dan nilai signifikan yakni sebesar $0,034 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan signifikan, sehingga H_2 dapat diterima.

c. Dana Perimbangan

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel dana perimbangan, dihasilkan bahwa t hitung senilai $-1,851 <$ dari t tabel senilai $1,660$ dan nilai signifikan yakni sebesar $0,066 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan, sehingga H_3 ditolak.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel pertumbuhan ekonomi, dihasilkan bahwa t hitung senilai $0,602 <$ dari t tabel senilai $1,660$ dan nilai signifikan yakni sebesar $0,548 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh Negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H_4 ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uji hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan, variabel bebas dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hipotesis yang pertama pada penelitian ini yakni pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah positif sebesar 13.282 dengan t hitung sebesar 3,682 ($3,682 > 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis pertama (H1) diterima. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien variabel positif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan signifikan dengan arah positif pada variabel. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap

bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan teori agensi (agency theory) menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah (agent) maka kinerja keuangan akan dinilai baik oleh masyarakat (principal). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyarudin (2021) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni Mubarak (2022) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah positif sebesar 14.403 dengan t hitung sebesar 2,137 ($2,137 > 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,034 ($0,034 < 0,05$), maka hipotesis pertama (H_2) diterima. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien variabel positif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan signifikan dengan arah positif pada variabel. Dapat disimpulkan bahwa belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya, keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal banyak diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu dalam kebutuhan pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari P. & Mustanda K. (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif.

4.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (2) disebutkan dana perimbangan terbagi menjadi 3 alokasi, antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus. Hipotesis yang kedua pada penelitian ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah negatif sebesar -6,397 dengan t hitung sebesar -1,851 ($-1,851 < 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,066 ($0,066 > 0,05$), maka hipotesis kedua (H3) ditolak. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan koefisien variabel negatif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan arah negatif pada variabel.

Artinya dana perimbangan berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah daerah untuk mencukupi jika terjadinya defisit pada daerah tersebut. Pengaruh dana perimbangan yang negatif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa, setiap ada kenaikan pada variabel dana perimbangan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Pemerintah daerah lebih menekankan pada menambah PAD untuk membiayai pos-pos yang bersifat meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan untuk pengeluaran di luar pos-pos tersebut, seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang habis pakai, menggunakan dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat). Karena jika semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kemandirian pemerintah daerah akan menurun.

Berdasarkan teori agensi dalam hal ini peran pemerintah pusat (principal) mendelegasikan wewenangnya yakni memberikan kebebasan dalam mengatur kegiatannya terhadap pemerintah daerah (agent). Tingginya ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kiara Sabila Haque, Abdul Rohman (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ernawati dan Jaelani (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Indrani Nuzul Fauziah dan Diah Ekaningtias (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hipotesis yang ke empat pada penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah negatif sebesar 0,018 dengan t hitung sebesar 0,602 ($0,602 < 1,660$) dan nilai signifikansi sebesar 0,548 ($0,548 > 0,05$), maka hipotesis keempat

(H4) ditolak. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan infrastruktur dan sarana prasarana. Jika sarana dan prasarana suatu daerah baik maka akan membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi nyaman dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang baik juga akan mendorong adanya investasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi di daerah belum bisa secara maksimal menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana daerah juga belum mendukung peningkatan investasi dan produktivitas masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju.

Perubahan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan karena faktor-faktor produksi dalam daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan tidak cukup hanya satu tahun, akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan. Berdasarkan teori agensi bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu daerah dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang beragam pula dalam suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Demikian pula sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur penurunan kinerja keuangan pemerintah

daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Krest D Tolosang (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan PAD yaitu $0,000 < 0,05$.
2. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan PAD yaitu $0,034 < 0,05$.
3. Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan dana perimbangan yaitu $0,066 > 0,05$.
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan pertumbuhan ekonomi yaitu $0,548 > 0,05$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan rasio pertumbuhan.
2. Penelitian ini menggunakan empat variabel tetapi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hanya dua variabel independen yaitu variabel PAD dan Belanja modal.

3. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari penelitian ini sebesar 20,4% nilai tersebut menggambarkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan pengaruh keseluruhan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Masih banyak sisanya yakni sebesar 79,6% yang dijelaskan oleh variabel lainnya.
4. Penelitian ini masih memiliki batasan hanya meneliti pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya.

5.3.2 Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel tetapi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hanya dua variabel independen yaitu variabel PAD dan Belanja Modal sehingga pada peneliti selanjutnya dapat menguji variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan pengaruh kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Peneliti juga dapat menggunakan indikator lain dalam pengukuran kinerja keuangan seperti rasio efisiensi, rasio ekonomi, rasio kemandirian dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrifa, M., Basri, H., dan Majid, S. A. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Manajemen Akuntansi. Universitas Syiah Kuala, 30-38. Tersedia di: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4523> [Diakses pada 12 Agustus 2021].
- Antari, S. G., dan Sendana, P. I. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi, Jurnal Manajemen, [online] ISSN: 2302-8912, Vol. 7, No. 2, 1080-1090. Tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/245984/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dan-belanja-modal-terhadap-kinerja-keuangan-peme> [Diakses pada 23 Agustus 2021].
- Astriani, R. (2020). *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Periode 2010-2019)*. Jurnal Ekonomi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 37-57. Tersedia di: <http://repository.radenfatah.ac.id/8152/> [Diakses pada 11 September 2021].
- Bpkad.banjarkab.go.id (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Tersedia di: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah> [Diakses pada 15 September 2021].
- Djpk. Kemenkeu. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. *Laporan Realisasi APBD Tahun 2016 sampai dengan 2020*. Tersedia di: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> [Diakses pada 15 September 2021].
- Ekasuryana, I. P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 8-28. [Diakses pada 21 Oktober 2021].
- Estetika, F. P., Sudarmanto, E., dan Maimunah, S. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 2-4. [Diakses pada 15 September 2021].
- Fathah, R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Ekonomi, ISSN: 2442-4439 Vol. 8, No. 1, 35. Tersedia di: <https://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109> [Diakses pada 25 Agustus 2021]